

ABSTRAK

Perwalian (*voogdij*) berasal dari kata wali mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum dalam penetapan wali bagi anak dibawah umur dalam perkara jual beli tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam penetapan wali bagi anak dibawah umur dalam perkara jual beli tanah penetapan nomor 151/Pdt.P/2020/PA Ckr. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dalam penetapan wali bagi anak dibawah umur dalam perkara jual beli tanah berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam penetapan nomor 151/Pdt.P/2020/PA Ckr. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Normatif yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) suatu metode pengumpulan data dengan menganalisa penetapan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 151/Pdt.P/2020/PA Ckr. Adapun kesimpulan penulis penetapan wali berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah wali dapat melakukan perbuatan hukum untuk mewakili anak perwalian nya tersebut dan pertimbangan Hakim dalam penetapan nomor 151/Pdt.P/2020/PA Ckr adalah benar sesuai dengan Hukum Positif di Indonesia.

Kata Kunci : Penetapan, Wali Anak, dan Jual Beli.

ABSTRACT

Guardianship (voogdij) comes from the word guardian which means another person as a substitute for parents who according to law are required to supervise and represent children who are not yet competent in carrying out a legal action. The issues raised in this study are what are the legal consequences in determining guardians for minors in cases of buying and selling land based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law and what are the considerations of Judges in determining guardians for minors in cases sale and purchase of land designation number 151/Pdt.P/2020/PA Ckr. The purpose of this study is to find out the legal consequences in determining guardians for minors in cases of buying and selling land based on Law number 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law and to find out the judge's considerations in determining number 151/Pdt.P/ 2020/PA Ckr. In this study, the authors used the Normative Juridical Approach Method, namely library research (Library Research), a data collection method by analyzing the Cikarang Religious Court's decision No. 151/Pdt.P/2020/PA Ckr. The author's conclusion is that the determination of guardians based on Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law is that guardians can perform legal actions to represent their guardian children and the judge's consideration in determination number 151 / Pdt.P / 2020 / PA Ckr is correct in accordance with Positive Law in Indonesia.

Keywords: *Determination, Child Guardian, and Buying and Selling.*